

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR
TANAH

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

RIFALDI

NIM: 201310110311110

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIFALDI
NIM : 201310110311110
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTOLO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
GORONTOLO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR
TANAH**

Diajukan Oleh:

RIFALDI

201310110311110

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 23 Januari 2018

Pembimbing Utama,

Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Dekan,

Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

RIFALDI

201310110311110

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 23 Januari 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

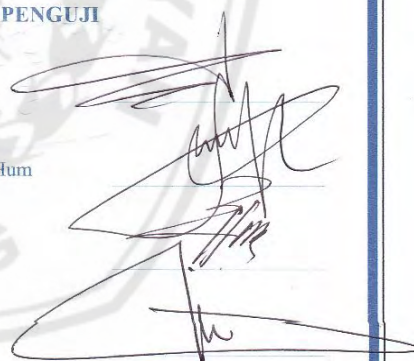
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji I : Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Ungkapan Pribadi:

Kamu adalah sutradara atas film yang kau mainkan

Buatlah cerita seperti yang kau inginkan

Tuhan yang menilai film mu kelak



Motto:

*Awan Mendung Belum Tentu Hujan, Siapa Tau Badai Yang Datang.
Jadi, Jangan Hanya Menyiapkan Payung.*

ABSTRAKSI

Nama : Rifaldi
Nim : 201310110311110
Judul : Analisis Yuridis Keabsahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Tanah
Pembimbing : Dr. Surya Anoraga SH., M.Hum
Catur Wido Haruni SH., M.Si., M.Hum

Pada Tahun 2016 lebih dari 3000 Peraturan Daerah telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Akibat dari pembatalan ini kerugian yang diderita oleh negara mencapai triliunan rupiah, karena biaya dalam pembuatan 1 Peraturan Daerah mencapai Rp300 juta. Hal ini disebabkan oleh pembentukan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan hal-hal yang dapat membatalkan Peraturan Daerah adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Dengan banyaknya jumlah Peraturan Daerah yang dibatalkan tidak berarti Peraturan daerah yang tersisa semuanya tidak bermasalah. Salah satu Peraturan Daerah bermasalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015. Permasalahan yang ditemui adalah payung hukum dan materi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 bersandar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, yang dimana Undang-Undang tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor/PUU-XI/2013. Pembatalan tersebut telah dilakukan 2 Tahun sebelum Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No 1 Tahun 2015. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui model studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian bahwa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 secara materil tidak absah namun secara formil masih berlaku.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pembatalan, Keabsahan

ABSTRACT

Name : Rifaldi
Nim : 201310110311110
Title : Juridical Analysis Of The Validity Of The Regulation Region Of
The Province Of Gorontalo Number 1 Year 2015 on managing
Groundwater
Counselor : Dr. Surya Anoraga SH., M.Hum
Catur Wido Haruni SH., M.Si., M.Hum

In the year 2016 over 3000 local regulations have been cancelled by the Ministry of Internal Affairs. A result of this cancellation losses suffered by the State reach trillions of rupiah, because the costs in making 1 local regulations reach Rp300 million. This is caused by the formation of local regulations that do not comply with the legislation. In Article 251 Act Number 23-year 2014, mentioning things that can cancel the local regulations is contrary to the provisions of legislation, public interest, and/or decency. With a large number of local regulations that are canceled do not mean the remaining area Regulations all not problematic. One of the problematic areas of the Regulations in this article are the Gorontalo Province Area Regulation number 1 of the year 2015. The problems encountered are the umbrella law and material contained in the regulations of the province of Gorontalo Area number 1 Year 2015 based on Act No. 7 of the year 2004, in which the legislation has been revoked by the Supreme Court through the verdict number/PUU-XI? 2013. The cancellation had done two years before Regulations Gorontalo Provinces. The purpose of this research is to know the validity of the Regulation region of Gorontalo Province No. 1 year 2015. The authors use research methods, namely normative juridical approach, with the techniques of data collection through model studies library (library research). The results of research that the Regulations of the province of Gorontalo Area number 1 of the year 2015 are not valid material but are formyl still apply.

Key Words: Local Regulations, Revocation, Validity

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: “Analisis Yuridis Keabsahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Tanah”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian ini tidak terlepas dari jasa-jasa berbagai pihak, ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Rohana dan Ayahanda tercinta Abdul Mana atas doa dan kasih sayang yang tak terbatas, serta segala bentuk motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang hingga terselesaikan program studi Strata 1 Ilmu Hukum.

2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.,Hum., selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing, mengarahkan dan menyetujui dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr Haris SH., M.,Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Said Noor Prasetyo SH., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Wali.
8. Bapak Dr. Surya Anoraga., SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing, mengarahkan dan menyetujui dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas pelayanan administrasi.
11. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada adik-adikku tersayang Rahayu Mayang Sari, Andini Lian Devi Artini, Novitasari dan Andika Dwi Pratama , serta untuk keluarga besar yang telah memberikan support dan doa demi kelancaran penelitian ini.
12. Teman-teman seperjuangan Kelas B Fakultas Hukum UMM 2013, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
13. Sahabat-sahabatku Mukhamad Khabib Risvian, Lanang Zussaukah, Imansyah Al Hafidh, Dwi Nur Iman, Bagus Fajar, Fajar Jihad, Hasbi Maulana, Zulfikar Mufthy, Miranto, dan Siti Wulandari, Frista Dwi Lestari atas kritik, saran, semangat, support dan doanya.

14. Keluarga Besar Kampung Di Malang Om Opick, Didi Army Setiawan, Rachmad Hidayat, Radianto, Dek Tyandra, Dek Putri, Dek Windi Syam, Abang Tauvan, Abang Hiskil. Terima kasih atas semangat, support dan juga doanya.
15. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 09 Januari 2018

Penulis

Rifaldi

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam	i
Surat Pernyataan Penulisan Hukum	ii
Lembar Pengesahan Sebelum Ujian	iii
Lembar Pengesahan Setelah Ujian.....	iv
Ungkapan Pribadi/Motto.....	v
Abstraksi	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran.....	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Kegunaan	6
E. Manfaat.....	7
F. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Jenis Bahan Hukum	9
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	12
B. Peraturan Daerah	
1. Tinjauan Umum Peraturan Daerah	16
2. Tahap Penyusunan Peraturan Daerah	17
3. Naskah Akademik.....	20
4. Pembatalan Peraturan Daerah	
a. <i>Judicial Reiview</i>	21
b. <i>Eksecutif Review</i>	26
C. Teori Keabsahan Peraturan Daerah	

1. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum	34
2. Bertentangan Dengan Peraturan Daerah Lain	36
3. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	36
D. <i>Interpretasi/Penafsiran Hukum</i>	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Persamaan Materi Muatan (Pokok) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Tanah	42
B. Keabsahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Tanah Setelah di Batalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air	
1. Keabsahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Tanah Teori Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	52
2. Keabsahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Tanah di Tinjau dari di Tinjau dari Teori Peraturan Daerah	55
3. Keabsahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Tanah di Tinjau dari Teori (Naskah Akademik)	56
4. Keabsahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Tanah di Tinjau dari Teori Keabsahan Peraturan Daerah	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

Daftar Pustaka.....	66
---------------------	----

Indeks.....	68
-------------	----

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4



DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	44
--------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Air Tanah



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- H. Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ni'matul Huda, 2009, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Dan Problematika*. Pustaka Pelajar
- Ni'matul Huda, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Fh Uii Press, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Paps Sinar Sinanti
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL

- Akhmad Adi Purawan, 2014, *Korupsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Recht Vinding Vol 3, No 3
- Al. Sentot Sudarwanto, 2015, *Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sda Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Yustisia Edisi 92 Mei Agustus
- Inna Junaenah, 2016, *Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September
- Khelda Ayunita. 2012. *Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Judicial Review Dan Executive Review*. Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
- M. Nur Sholikin. 2014., *Perbaikan Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum Dan Peradilan Volume 3, Nomor 2 Juli 2014

Muhammad Suharjono, 2014, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19

Ni'matul Huda, 2006, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No 1 Vol 13 Januari, Issn: 2527-502

Novira Maharani Sukma. 2017, *Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri*. Jurnal Justisia Nomor Issn : **2355-0023**. Volume 5 N No 11 Maret 2017.

Yusdiyanto, 2012, *Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember. Issn 1978-518

TESIS

Quido Benyamin Ngaji, 2015, *Kewenangan Pembatalan Produk Hukum Daerah Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Ri.Tahun 1945*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

SKRIPSI

Nila Dwi Rakanthi, 2016, *Implikasi Hukum Atas Dikabulkannya Gugatan Pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Telah Dibatalkan)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Tanah.